

TESIS

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL
NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh:

ROZI ARDIATMA
NIM : 2120123018

Komisi Pembimbing:

DR. AZMI FENDRI, S.H.,M.Kn.

DR. DELFIYANTI, S.H.,M.H.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN
PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA
PEKANBARU**

*Rozi Ardiatma, 2120123018, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2023.*

ABSTRAK

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, adanya permasalahan protokol Notaris yang masih menggantung dan penolakan dari Notaris untuk menerima protokol Notaris terkait menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Tesis ini membahas tentang *pertama* bagaimana Kewajiban ahliwaris dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di Kota Pekanbaru dan *kedua* bagaimana peranan majelis pengawas daerah dalam penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia. Penelitian hukum ini merupakan gabungan penelitian normatif dan empiris, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pada pasal 63 UUJN telah dijelaskan mengenai penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, akan tetapi dalam prakteknya terjadi ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Lain atau Majelis Pengawas Daerah (MPD), Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk, hal ini disebabkan karena minimnya edukasi dan sosialisasi dari Notaris itu sendiri kepada ahli waris atau keluarganya sehingga tanggung peran MPD menjadi tidak optimal. Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi Peran Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan UUJN yaitu menunjuk Notaris lain sebagai penerima protokol notaris atau mengangkat Pejabat Notaris sementara atas usulan dari ahli waris akan tetapi, Pejabat Notaris sementara tersebut hanya menjalankan tugasnya selama 30 (tiga puluh) hari saja, tujuannya untuk menyiapkan berkas-berkas yang terbengkalai, lewat dari 30 (tiga puluh) hari, Pejabat Notaris Sementara itu harus menyerahkan protokol tersebut melalui MPD dan Kemudian MPD akan menunjuk siapa penerima atau pemegang protokol tersebut dengan membuat Berita Acara Penyerahan, akan tetapi MPD tidak dapat menjalankan perannya dikarenakan ahli waris tidak memiliki kemampuan dalam hal Penyerahan Protokol Notaris ini.

Kata Kunci : *Peran, Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Protokol Notaris.*

**THE ROLE OF THE REGIONAL SUPERVISORY ASSEMBLY IN THE
DELIVERY OF PROTOCOL FOR NOTARIES WHO DIED IN PEKANBARU
CITY**

Rozi Ardiatma, 2120123018, Master of Notary Affairs, Faculty of Law,
Andalas University, 2023.

ABSTRACT

Notary Protocols are a collection of documents which are state archives which must be kept and maintained by Notaries. The problem of Notary Protocols which is still pending and the Notary's refusal to accept the related Notary Protocols is the background for writing this thesis. This thesis discusses, firstly, the obligations of the heirs in handing over the protocols of notaries who have died in Pekanbaru City and secondly the role of the regional supervisory council in handing over the protocols of notaries who have died. This legal research is a combination of normative and empirical research, which uses legislative and case approaches, as well as qualitative analysis methods. The results of this research conclude that, Article 63 UUJN has explained the handing over of protocols to Notaries who have died, but in practice there are inconsistencies with the applicable regulations. The heirs of a Notary who dies are obliged to submit Notary Protocols to another Notary or the Regional Supervisory Council (MPD). With the death of a Notary, all his responsibilities end and the Notary's protocols in question must be immediately submitted to the Regional Supervisory Council (MPD) through an expert. the inheritance is then kept by the Notary who holds the protocol that has been appointed, this is due to the lack of education and outreach from the Notary himself to the heirs or their families so that the MPD's role is not optimal. The Notary who receives and keeps the Notary protocol is not responsible for the substance of the Regional Supervisory Council's role in accordance with UUJN provisions, namely appointing another Notary as the recipient of the notary protocol or appointing a temporary Notary Officer based on a proposal from the heirs, however, the temporary Notary Officer only carries out his duties for 30 (thirty) days only, the aim is to prepare neglected files, after 30 (thirty) days, the Temporary Notary Officer must submit the protocol via the MPD and then the MPD will appoint the recipient or holder of the protocol by making a Minutes of Submission. However, the MPD cannot carry out its role because the heirs do not have the ability to submit this Notarial Protocol.

Keywords: *Role, Regional Supervisory Council, Notary, Notary Protocol.*